

**KENDALA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
DALAM UPAYA PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mendapat Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial  
Ilmu Politik Universitas Andalas*

**Oleh:**

**ARIALDI KASPARI**

**1810832039**



**Pembimbing**

**Dr. Tengku Rika Valentina, MA**

**Mhd Fajri, S.IP., MA**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

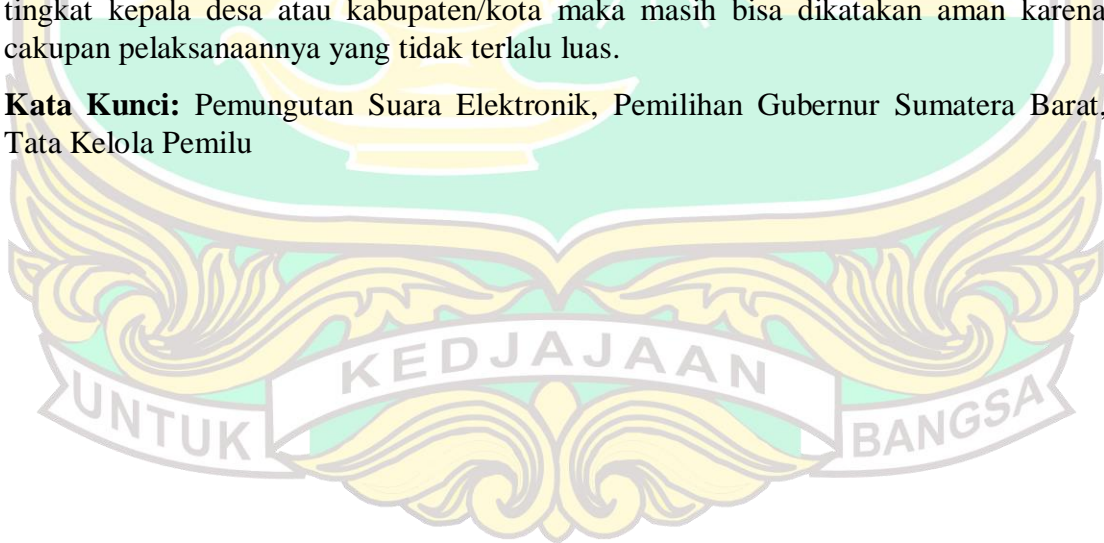
**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah-satu daerah yang turut melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang masih dilakukan secara konvensional. Pilgub Sumbar memiliki tahapan prosedural yang sering memunculkan banyak persoalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka salah-satu gagasan yang muncul adalah pemungutan suara elektronik atau *e-voting*. Beberapa daerah di Indonesia tercatat pernah mengadopsi pemungutan suara secara elektronik salah-satunya Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Ada pun hasil penelitian yang didapatkan adalah: *Pertama*, peraturan mengenai penggunaan sistem *e-voting* pada Pemilihan Kepala Daerah sudah tertera pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mana pemberian suara dapat dilakukan dengan memberi tanda pada surat suara atau melalui peralatan elektronik. Namun mesti mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat. *Kedua*, pihak penyelenggara masih sulit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, geografis, dan kebudayaan yang berbeda-beda. *Ketiga*, dari segi operasional dan logistik, daerah Sumatera Barat masih memiliki banyak kekurangan seperti jaringan elektronik yang belum merata di seluruh daerah. *Keempat*, Penerapan sistem *e-voting* pada tingkat provinsi masih sangat rawan terjadi kecurangan. Namun jika dibandingkan dengan pemilihan di tingkat kepala desa atau kabupaten/kota maka masih bisa dikatakan aman karena cakupan pelaksanaannya yang tidak terlalu luas.

**Kata Kunci:** Pemungutan Suara Elektronik, Pemilihan Gubernur Sumatera Barat, Tata Kelola Pemilu



## **ABSTRACT**

*West Sumatra Province is one of the regions that participates in the election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra which is still carried out conventionally. The West Sumatera governor election has a procedural stage that often raises many problems. To overcome these problems, one idea that has emerged is electronic voting or e-voting. Several regions in Indonesia have adopted electronic voting, including Agam Regency, West Sumatra. Based on this, this research aims to describe the obstacles of the KPU of West Sumatra Province in an effort to implement an e-voting system in the West Sumatra Governor Election. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis type. There are also research results obtained are: First, the regulations regarding the use of e-voting system in the Regional Head Election are already stated in Article 85 of Law Number 10 Year 2016 on Regional Head Election, where voting can be done by marking the ballot paper or through electronic equipment. However, it must consider the readiness of the local government and the readiness of the community. Second, it is still difficult for the organisers to maintain and improve the quality of existing human resources. This is influenced by different sociological, geographical and cultural conditions. Third, in terms of operations and logistics, the West Sumatra region still has many shortcomings such as electronic networks that have not been evenly distributed throughout the region. Fourth, the implementation of e-voting system at the provincial level is still very prone to fraud. However, when compared to elections at the village or district / city head level, it can still be said to be safe because the scope of implementation is not too broad.*

**Keywords:** *Electronic Voting, West Sumatra Governor Election. Election Governance*

